

ABSTRAK

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Meningkatnya jumlah penduduk di Kota Bukittinggi mendorong untuk dilakukannya pencatatan data kependudukan yang baik karena data kependudukan sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah: Mengetahui dampak masyarakat tentang pengurangan tupoksi RT/RW di Kelurahan Puhun Tembok, kota Bukittinggi dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat. Jenis penelitian yang digunakan adalah Pendekatan tipe deskriptif dengan analisa kualitatif, dengan wawancara langsung terhadap narasumber. Kebijakan administrasi kependudukan terpadu dalam penelitian ini difokuskan pada pelayanan dasar KTP yang meliputi: dasar kebijakan atau peraturan yang dipakai, wewenang dan tanggung jawab organisasi pelaksana, prosedur pelayanan pembuatan dokumen perpindahan penduduk, dokumen administrasi, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang terjadi pada pengurangan tupoksi RT/RW sesuai dengan Implementasi Kebijakan Perpres No.96 Tahun 2018 memiliki dampak baik dan dampak buruk yakni, dampak baiknya adalah Dengan tidak lagi pengambilan formulir ke RT/RW masyarakat tidak takut lagi untuk mengurus masalah kependudukan, dan dampak buruknya adalah, warga menjadi individual di lingkungan RT/RW setempat, bertambahnya beban tugas kelurahan.

Kata kunci: Administrasi, Dampak, Implementasi, Kebijakan, Kependudukan